

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena makin meningkatnya tuntutan standarisasi mutu, sertifikasi kompetensi, dan persaingan dalam berbagai aspek pekerjaan. Di sisi lain, kesenjangan untuk mencapai standar tersebut masih menjadi permasalahan mendasar yang dihadapi oleh para pekerja di Indonesia. Pekerja bangunan merupakan salah satu gambaran realitas antara tuntutan modernitas industri kapitalis yang menuntut sertifikasi keahlian dengan kondisi pekerja sebagai kelompok marginal yang melakukan pekerjaannya dalam kehidupan yang khas. Sertifikasi tenaga kerja bertujuan untuk melindungi tenaga kerja Nasional agar memiliki nilai tambah dan siap dalam menghadapi liberalisasi perdagangan ASEAN 2015 dan Asia Pasifik 2020. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja, serta setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja (UU Nomor 18 Tahun 1999).

Kehidupan yang khas salah satunya ditunjukkan dengan kekuatan modal sosial dan karakter kerja yang dimiliki pekerja bangunan. Modal sosial yang terbangun secara historis dalam keseharian para pekerja yang senantiasa membagi informasi dan berbagi pekerjaan kepada pekerja lainnya, saling menjaga kepercayaan dan saling membantu dalam penyelesaian masalah. Sementara kekhasan dalam karakter kerja salah satunya ditunjukkan dengan tingkatan keterampilan diantara para pekerja, cara saling mengajarkan keterampilan dan kepatuhan relasi yang dibangun (Samuel & Badaruddin, 2015).

Keterampilan membangun dalam kultur masyarakat Indonesia sampai saat ini masih menjadi bagian dari tradisi turun temurun yang dipelajari secara autodidak. Pekerja bangunan yang tersebar di berbagai proyek pekerjaan konstruksi sebagian besar adalah kelompok masyarakat perdesaan yang mendapatkan ilmu dan keterampilan membangunnya tidak melalui pendidikan atau pelatihan formal di bidang bangunan. Studi awal yang dilakukan terhadap

para pekerja bangunan, hanya satu orang saja dari kurang lebih 130 orang pekerja bangunan yang merupakan lulusan sekolah kejuruan (SMK Bangunan). Sebagian besar lainnya merupakan lulusan sekolah umum, yang karena tidak ada pilihan pekerjaan lain, mereka mengikuti pendahulunya atau tetangga sebagai pekerja bangunan (Widaningsih, 2016).

Data keterserapan tenaga kerja lulusan SMK dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan dibanding lulusan SMA. Pada kurun waktu 5 tahun pertama, dari tahun 2000 sampai dengan 2005, tingkat kebekerjaan lulusan SMK masih lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan SMA. Akan tetapi, selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2010 s.d. 2015) tingkat kebekerjaan lulusan SMA justru lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan SMK. Perubahan tersebut setidaknya disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, antara lain *pertama*, tuntutan keterampilan abad 21 yang lebih membutuhkan keterampilan berpikir logis; *kedua*, kebijakan rasio SMA-SMK (30%:70%) menyebabkan terjadinya lonjakan lulusan SMK yang masuk ke dunia kerja sehingga ada kelebihan pasokan tenaga kerja; *ketiga*, gabungan dari keduanya, yaitu jenis keterampilan pekerja baru yang dibutuhkan dunia kerja berubah, yaitu menjadi pekerja baru yang lebih memiliki kemampuan berpikir logis sementara SMK memasok lebih banyak lulusan dengan jenis keterampilan (Dokumen Revitalisasi Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daya serap tenaga kerja lulusan SMK yang sesuai dengan pendidikannya masih sangat rendah, disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah karena kompetensi yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja industri. Pekerjaan bangunan dianggap sebagai pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapa saja melalui proses pengalaman dan keterlibatan secara terus menerus yang dimulai dari tingkatan pekerjaan sederhana sebagai kenek (asisten tukang) sampai memiliki keterampilan tertentu sebagai tukang. Permasalahan lain muncul dari masyarakat yang masih menganggap pekerja bangunan sebagai pekerjaan rendah yang tidak terikat pada aturan tertentu sehingga sistem hubungan pekerjaan antara pemberi tugas (*owner*) dengan pekerja ditentukan oleh kesepakatan “informal”. Hubungan antara pemilik bangunan dengan pekerja bangunan pada pekerjaan rumah tinggal

misalnya, sebagian besar masih bersifat tradisional yang mengandalkan negosiasi dan kepercayaan (*trust*) tanpa terikat pada kontrak tertulis (Samuel, Badaruddin 2015). Negosiasi dilakukan pada saat ada kesepakatan pelaksanaan pekerjaan di mana terjadi proses tawar menawar antara pemberi tugas dan pekerja dalam hal upah dan lama waktu pekerjaan.

Kepercayaan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan pekerjaan bangunan, baik antara pemberi tugas dengan pekerja maupun antar sesama pekerja bangunan. Dalam kultur masyarakat perdesaan, kepercayaan terhadap kepala tukang menjadi penentu juga dalam hal kesepakatan pengupahan. Kesepakatan pengupahan tidak bisa sama antara satu tukang dengan tukang yang lainnya, meskipun rata-rata besarnya tidak jauh berbeda. Artinya, spesifikasi keterampilan, tingkat keahlian dan pengupahan pada pekerjaan tidak terstandar secara formal, akan tetapi menjadi kesepakatan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Aspek tersebut begitu kuat yang memberikan gambaran bahwa pekerja bangunan masih menjadi pekerja informal yang masih jauh dari perlindungan aturan hukum formal. Namun demikian, tingkat keberuntungan (*survive*) para pekerja bangunan memiliki tempatnya tersendiri di tengah masyarakat baik di perdesaan maupun di perkotaan. Bagi sebagian besar pekerja bangunan, selama masih mendapatkan pekerjaan, dan kehidupan ekonomi keluarga masih bisa berjalan, betapapun jauh dari sejahtera, mereka tidak banyak berpikir sulit tentang masalah persaingan di industri konstruksi.

Wawancara yang dilakukan pada para pekerja bangunan pada studi awal, ada sikap yang menunjukkan tidak terlalu pentingnya pengakuan legal seperti sertifikasi keahlian bagi mereka. Bahkan ada anggapan bahwa batasan keahlian yang disertifikasi akan menghambat mereka dalam memperoleh pekerjaan bangunan di masyarakat. Minimnya informasi sertifikasi keterampilan dan aksesibilitas terhadap pendidikan dan pelatihan bagi para pekerja bangunan membuat ketidakpahaman dan ketidakpedulian di kalangan pekerja terhadap prasyarat legalitas tersebut. Di sisi lain, salah satu prasyarat dalam industri konstruksi menganggap sertifikasi pekerja bangunan memiliki nilai penting agar mereka mempunyai kemampuan serta keterampilan yang memadai.

Pandangan dan kondisi seperti itu, tentunya akan menjadi masalah manakala para pekerja bangunan mulai memasuki wilayah perkotaan dengan keterlibatan pada proyek pembangunan dalam skala besar. Tidak bisa dipungkiri, kebutuhan pekerja bangunan yang makin meningkat di satu sisi, serta tuntutan budaya kerja modern dan keterampilan tinggi di sisi lainnya adalah realitas kesenjangan (*gap*) yang ada saat ini.

Karakteristik yang terbentuk dari pekerja bangunan yang berasal dari berbagai daerah menjadi unik dan menarik yang menggambarkan sebuah pola budaya masyarakat pekerja yang lahir dan dibesarkan dalam tradisionalitas. Kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk mulai dari cara saling membagi keterampilan vokasional, membangun jaringan pekerjaan, hubungan yang dibangun antar sesama pekerja atau antara pekerja dengan pemberi tugas, sistem pengupahan dan hal-hal lain yang melekat pada para pekerja bangunan menjadi nilai tersendiri di samping tantangan berat jika dihadapkan pada pola modernitas di industri konstruksi yang berkembang saat ini. Perkembangan industri konstruksi dan teknologi membangun dengan tingkat persaingan yang tinggi adalah fenomena lain yang harus dihadapi oleh para pekerja bangunan.

Perkembangan industri konstruksi dari skala kecil (rumah tinggal) sampai pada proyek trans nasional atau internasional di perkotaan menunjukkan grafik yang makin meningkat. Bagaimanapun, proyek-proyek tersebut tidak akan lepas dari para pekerja bangunan yang berasal dari berbagai pelosok desa. Kontribusi para pekerja bangunan dalam industri konstruksi sangat besar, namun demikian secara struktur ketenakerjaan, mereka merupakan kelompok pekerja informal yang dibutuhkan oleh industri konstruksi (formal). Pekerja informal tidak memiliki atau tunduk pada undang-undang tenaga kerja, tidak dikenakan pajak pendapatan, minimnya perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja. Kondisi tersebut yang menjadi salah satu penyebab masih sulitnya menstrukturisasi tenaga kerja konstruksi dalam pola ketenagakerjaan yang mampu menjamin hak-hak mereka, standarisasi upah, mendapatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja (Rothenberg dkk., 2016).

Di samping legalitas formal, kondisi umum pekerja bangunan (konstruksi) pada saat ini (Djatnika dkk. 2005, hlm. antara lain: 1) Tidak terstrukturanya pola ketenagakerjaan, 2) Kurangnya *feedback* terhadap dunia pendidikan dan pelatihan, 3) Tidak efesiennya alokasi tenaga kerja, rendahnya kinerja, profesionalisme dan daya saing jika dibandingkan dengan tenaga kerja negara lain. Tenaga kerja yang kompeten/profesional ditandai dengan adanya kemampuan terhadap pengetahuan sesuai pekerjaannya, keterampilan atau keahlian yang diperoleh dari pengalamannya selama ini, serta memiliki sikap kerja atau perilaku baik, sesuai standar kompetensi yang ditetapkan (UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan) (Suhono, 2011, hlm. 1).

Jika melihat data perkembangan industri konstruksi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2015), Indonesia termasuk dalam negara yang menjadi pasar jasa konstruksi terbesar dengan nilai 267 miliar dolar AS. Di antara negara Asia, Indonesia termasuk dalam peringkat keempat di bawah China (1,78 triliun dolar AS), Jepang (742 miliar dolar AS) dan India (427 miliar dolar AS). Data tersebut diperkuat dengan tren perkembangan pekerja bangunan yang setiap tahunnya makin meningkat. Data terbaru (BPS 2016) pasar tenaga kerja sektor konstruksi pada tahun 2013 tercatat sebesar 6.349.387 orang (5,63%), berkembang cukup signifikan pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 7.280.086 orang (6,35%) dan 8.208.086 orang (7%). Artinya, keterserapan atau keterlibatan para pekerja bangunan dalam industri konstruksi dalam kurun waktu satu tahun mengalami peningkatan sebesar 0,70 % atau kurang lebih 930.000 pekerja.

Dari data tersebut, muncul pertanyaan mendasar, dari manakah para pekerja bangunan yang terlibat dalam industri konstruksi tersebut, bagaimana keterampilan mereka, siapa dan bagaimana mereka bisa terlibat, lembaga pendidikan dan pelatihan mana yang mempersiapkan mereka serta berbagai pertanyaan lain yang mungkin tidak pernah terpikirkan. Lebih jauh, tentu siapapun tidak pernah peduli bagaimana rumah mewah, tempat ibadah, perkantoran, gedung-gedung tinggi dan semua infrastruktur yang terbangun itu di baliknya merupakan sentuhan tangan-tangan kasar para pekerja bangunan. Tidak pernah banyak tercatat semua bangunan itu sebagai karya mereka, di sisi lain bagi para pekerja bangunan pun mungkin tidak penting pengakuan itu. Namun,

perjuangan para pekerja bangunan yang berasal dari berbagai daerah mulai terbiasa dan terlatih untuk terampil sampai pada kemampuan memiliki nilai jual jasa mereka adalah proses panjang yang secara kultural dan sosiologis tidak banyak dikaji.

Keterampilan pekerja bangunan sebagai bagian dari pendidikan vokasional menjadi penting untuk dikaji mengingat gap yang masih jauh antara realitas pekerja bangunan dengan tuntutan dan persaingan kerja di industri konstruksi. Diperlukan kajian secara mendalam dan komprehensif bagaimana kesenjangan tersebut dalam jangka waktu tertentu dapat dieliminir oleh desain pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan sistem ke arah yang *market requirement oriented* di satu sisi. Sementara, sisi lain yang paling penting juga adalah bagaimana bentuk, metode pendekatan yang tepat sebuah desain pendidikan dan pelatihan bagi pekerja bangunan yang didasarkan pada pemahaman kultural karakter kerja pekerja bangunan.

Sekaitan dengan itu, penelitian ini mencoba mengeksplorasi lebih dalam dengan pendekatan etnografi dan etno-andragogik sejauh mana transformasi budaya yang terbentuk pada para pekerja bangunan. Transformasi budaya merujuk pada pemahaman tentang kebudayaan pada suatu kelompok masyarakat yang terwujud dan tersalurkan melalui perilaku manusia. Dalam konteks penelitian ini, perkembangan dan proses perubahan yang terjadi di kelompok masyarakat pekerja bangunan dari generasi yang ada sekarang dengan segala dinamikanya yang terwujud dalam sistem kerja dan kehidupan mereka sehari-hari.

Penelitian diharapkan dapat menggali bagaimana pola budaya itu tumbuh dan berkembang serta bagaimana pola pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sudah berjalan di kalangan pekerja bangunan secara kultural. Secara lebih detail penelitian akan mengungkap sejauhmana sikap, tingkat keterampilan, cara memperoleh keterampilan, budaya kerja yang terbentuk, proses pengembangan kapasitas di komunitas pekerja bangunan, tradisi dalam mengajarkan keterampilan, adaptasi terhadap teknologi baru, serta sistem nilai yang mendorong atau menghambat terhadap tuntutan perubahan di kalangan pekerja bangunan.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Percepatan perkembangan industri konstruksi tidak dibarengi dengan peningkatan keterampilan vokasional para pekerja bangunan;
2. Pekerja bangunan yang terlibat dalam industri konstruksi baik skala rumah tinggal maupun bangunan umum sebagian besar tidak dibekali dengan pendidikan dan pelatihan formal di bidang bangunan;
3. Pekerja bangunan tidak terstruktur secara formal sebagai pekerja yang memiliki jaminan sosial, padahal resiko pekerjaan dengan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi cukup tinggi;
4. Pengetahuan dan keterampilan vokasional yang dimiliki pekerja bangunan dikembangkan secara tradisional sehingga masih ada kesulitan masuk pada standar dan prasyarat pekerjaan modern yang menuntut sertifikasi dan standar baku mutu;
5. Budaya kerja masih tradisional yang belum terbiasa dengan pemenuhan standar pekerjaan bangunan secara profesional;
6. Sulitnya akses para pekerja bangunan terhadap informasi dan kesempatan pelatihan yang mendorong tersertifikasinya keterampilan mereka;
7. Karakter kerja bangunan sangat tergantung pada latar belakang budaya dan sosial di mana para pekerja bangunan itu berasal.

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode etnografi dan etno-andragogik untuk mengungkapkan, mendeskripsikan, mengeksplorasi secara lebih mendalam terkait keterampilan vokasional para pekerja bangunan dengan budaya yang melatarbelakanginya. Prinsip dalam penelitian etnografi berbeda dengan penelitian positivistik yang menerapkan begitu ketat batasan masalah, analisis yang dikaji dengan menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif. Metode etnografi memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mendapatkan temuan lapangan dan mengembangkannya sesuai situasi dan kondisi aktual dan faktual sehingga didapat gambaran menyeluruh/holistik dari kajian yang dilakukan. Namun demikian, untuk mendapatkan fokus yang lebih komprehensif dan mendalam, penelitian ini akan membatasi pada aspek yang terkait dengan pola transformasi yang dilakukan

oleh pekerja bangunan secara tradisional dikaitkan dengan pengembangan keterampilannya dalam tuntutan modernitas industri konstruksi.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang terkait dengan fenomena kultural pekerja bangunan dengan tuntutan dan persaingan industri konstruksi tersebut, dapat dirumuskan suatu permasalahan penelitian sebagai berikut: **“Bagaimana pola transformasi budaya pekerja bangunan dalam mengembangkan keterampilan vokasional?”**.

Rumusan masalah penelitian dibagi dalam 2 sub pokok masalah yaitu pendalaman aspek budaya kerja dan pola pewarisan keterampilan vokasional. Budaya kerja menyangkut aspek:

1. Bagaimana tingkat keterampilan yang dimiliki?
2. Bagaimana aspek sosial dan budaya dalam membangun jejaring kerja?
3. Bagaimana sikap dan pandangan terhadap pekerjaan?
4. Bagaimana sikap dan penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)?
5. Bagaimana sikap dan pandangan terhadap upah dan penghargaan kerja?
6. Bagaimana sikap dan pandangan terhadap sertifikasi keterampilan?

Pewarisan keterampilan vokasional menyangkut aspek:

7. Bagaimana pewarisan keterampilan vokasional mereka?
8. Bagaimana pola transformasi budaya kerja yang terbentuk?
9. Bagaimana pola pengembangan keterampilan vokasional?
10. Bagaimana relevansi antara latar akademik, pendidikan dan pelatihan vokasional?

Rumusan tersebut diformulasikan ke dalam aspek yang dianalisis dan dibahas secara komprehensif untuk menggambarkan bagaimana proses transformasi melalui pewarisan budaya kerja para informan penelitian dalam mengembangkan keterampilan vokasionalnya. Pertanyaan penelitian dalam proses analisis dan pembahasan akan dikembangkan dan dikaitkan dengan berbagai isu dan permasalahan baik pada tingkat mikro maupun makro sistem. Isu dan permasalahan yang mendasar terkait dengan budaya kerja, tuntutan industri konstruksi, kesenjangan pendidikan dan pelatihan vokasional, nasib pekerja bangunan serta regulasi yang ada.

1.5. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai pola transformasi budaya pekerja bangunan dalam mengembangkan keterampilan vokasionalnya dengan detail yang akan diteliti antara lain:

1. Mengukur tingkat keterampilan yang dimiliki.
2. Melakukan analisis kritis terhadap aspek sosial budaya para pekerja dalam membangun jejaring kerja.
3. Mengeksplorasi sikap dan pandangan informan terhadap pekerjaannya.
4. Melakukan analisis terhadap upah dan penghargaan kerja.
5. Melakukan analisis terhadap masalah kesehatan dan keselamatan kerja.
6. Mengetahui pandangan mereka terhadap sertifikasi keterampilan.
7. Menguraikan secara mendalam pola pewarisan keterampilan yang dilakukan.
8. Menggambarkan pola transformasi budaya kerja yang terbentuk.
9. Menggambarkan pola pengembangan keterampilan vokasional
10. Serta menganalisis transformasi budaya tersebut kaitannya dengan latar akademik, pendidikan dan pelatihan vokasional.

1.6. Definisi Operasional Aspek Penelitian

Untuk memperjelas konsep dan ruang lingkup analisis, setiap aspek yang mengacu pada rumusan penelitian dibuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Tingkat keterampilan merupakan pengukuran terhadap para informan pada penelitian pendahuluan untuk mengetahui sejauh mana keterampilan teknis dan pemahaman tentang K-3 yang dimiliki. Pengukuran tingkat keterampilan mengacu pada Kualifikasi Keterampilan Kerja di Bidang Arsitektur (TA) sesuai Akreditasi BSK: 117/KPTS/LPJK/X/2009.
2. Aspek sosial budaya merupakan kajian historis dan sosiologis terhadap informan penelitian. Kajian historis merupakan kajian morfologis para informan setiap dekade dikaitkan dengan isu sosial, ekonomi dan politik yang melatarbelakanginya. Kajian sosiologis menyangkut konsep kehidupan sosial

para informan yang terkait teori migrasi, teori modal sosial, ikatan lokalitas dan teori paguyuban (*Gemeinschaft*).

3. Aspek sikap dan pandangan terhadap pekerjaan merupakan landasan filosofis yang menginterpretasikan konsep kerja, pekerjaan dan bekerja dari sudut pandang informan. Konsep ini dikaitkan dan dikonfirmasi dengan teori kelas pekerja (Karl Marx), pembagian kerja (Emile Durkheim), Makna Kerja (Frans Magnis Suseno).
4. Aspek sikap dan pandangan terhadap upah dan penghargaan kerja merupakan eksplorasi pemaknaan terhadap upah sebagai bagian dari penghargaan kerja yang diterima informan. Konsep ini dikonfirmasi dengan aturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja, upah dan besaran upah minimum yang diatur di setiap kota dan kabupaten.
5. Aspek sikap dan pandangan tentang kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan eksplorasi terhadap kondisi informan dan pemaknaan terhadap perilaku sehat, kesehatan diri, kesehatan di tempat kerja dan kecelakaan kerja. Konsep ini menggambarkan budaya kerja para informan dikaitkan dengan isu dan persyaratan standar K-3.
6. Aspek sikap dan pandangan terhadap sertifikasi keterampilan mengeksplorasi sejauhmana pengetahuan yang menyangkut tujuan, manfaat serta kesiapan informan menghadapi tuntutan sertifikasi.
7. Aspek pola pewarisan keterampilan vokasional merupakan gambaran holistik terhadap pola pembelajaran keterampilan yang dilakukan secara bertahap. Konfirmasi terhadap teori dan konsep pendidikan sepanjang hayat, belajar sambil bekerja (*learning by doing*) dan belajar di tempat kerja (*learning in workplace*) dalam mengembangkan keterampilan.
8. Aspek transformasi budaya kaitannya dengan latar akademik, pendidikan dan pelatihan vokasional merupakan pola perubahan dan perbedaan yang terjadi pada setiap fase masa, isu serta kebijakan pendidikan vokasi yang melatarbelakanginya.